

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN TABANAN TA 2013

Denpasar, Rabu (11 Juni 2014) – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, BPK RI melaksanakan penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran (TA) 2013.

LHP atas Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan yakni:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013 yang memuat opini;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013;
3. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK RI, Arman Syifa, kepada Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Ketut Suryadi, dan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, **BPK RI menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013.**

Opini tersebut diberikan mengacu pada Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa LHP yang akan diserahkan oleh BPK RI memuat opini atas Laporan keuangan.

Opini yang diberikan oleh BPK RI didasarkan atas:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan Piutang Lainnya pada Badan Rumah Sakit Umum (BRSU) Tabanan tidak tertib.
2. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Kesehatan dan BRSU Tabanan tidak tertib.
3. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tabanan TA 2013 belum tertib.

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada enam Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Tabanan belum didukung bukti yang memadai.

Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Djatu Apriellia (Kasubbag Hukum dan Humas)

Telp : (0361) 229193

Fax : (0361) 229184, 256205

website : www.denpasar.bpk.go.id

e-mail : subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com